

SINERGITAS SIPIL MILITER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM STUDI KASUS KERJASAMA LANTAMAL III JAKARTA DENGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA

Yanuar Udianto Kurniadi, Wisnu Santoso, Basuki Tri Usodo
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Abstrak

Kegiatan penanggulangan bencana meliputi seluruh aspek dari tahap sebelum terjadi bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan, saat terjadi bencana atau tanggap bencana dan pemulihan setelah terjadi bencana. Lantamal III Jakarta mempersiapkan ratusan personel dan armada untuk melakukan evakuasi korban banjir di Jakarta. Persiapan ini sebagai bentuk upaya membantu warga Jakarta. Komandan Lantamal III mengatakan, telah berkoordinasi dengan satgas bencana pemerintah daerah untuk mempersiapkan personel dan sejumlah armada untuk mengevakuasi masyarakat. Setiap harinya satuan ini menyiapkan 114 personel, 4 truk pengangkut perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif serta analisis menggunakan Nvivo 12. Lokasi penelitian di Markas Komando Lantamal III Jakarta. Teori yang digunakan adalah Teori Kapabilitas, Teori Strategi Militer, Teori Manajemen Bencana, Teori Sinergitas, Teori Kerjasama Sipil Militer, Teori Implementasi Kebijakan, dan Teori Aturan Pelibatan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kesiapsiagaan Lantamal III dalam penanggulangan bencana di DKI Jakarta, implementasi OMSP Lantamal III, dan Sinergitas Lantamal III dengan pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana di DKI Jakarta penting sekali dengan melibatkan masyarakat maritim. Rencana ini mencakup keterlibatan personel, peralatan, dan pelatihan bagi komunitas maritim. Kesimpulannya adalah Lantamal III Jakarta yang bersinergi dengan Pemerintah. Daerah DKI Jakarta berperan penting dalam penanggulangan bencana banjir dengan fokus pada kesiapsiagaan, sinergitas, dan pelaksanaan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peran ini mencakup dukungan logistik, personel, teknologi, serta koordinasi erat dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan penanggulangan yang efektif dan terpadu.

Kata kunci: *Sinergitas Sipil Militer, Penanggulangan Bencana, Pemerintah DKI Jakarta, Lantamal III Jakarta.*

Abstract

Disaster management activities cover all aspects from the stages before a disaster occurs such as mitigation, preparedness and prevention, during a disaster or disaster response and recovery after a disaster occurs. Lantamal III Jakarta is preparing hundreds of personnel and fleet to evacuate flood victims in Jakarta. This preparation is a form of effort to help Jakarta residents. Commander Lantamal III said he had coordinated with the regional government's disaster task force to prepare personnel and a number of fleets to evacuate the community. Every day this unit prepares 114 personnel and 4 trucks carrying rubber boats to evacuate flood victims in the community. This research uses qualitative methods with descriptive research design and analysis using NVivo 12. The research location is at Lantamal III Jakarta Command Headquarters. The theories used are Capability Theory, Military Strategy Theory, Disaster Management Theory, Synergy Theory, Civil Military Cooperation Theory, Policy Implementation Theory, and the Indonesian Navy's Rules of Engagement Theory. The research results show that: Lantamal III's preparedness in disaster management in DKI Jakarta, implementation of Lantamal III OMSP, and Lantamal III's synergy with the DKI Jakarta government in disaster management in DKI Jakarta are very important by involving the maritime community. This plan includes the involvement of personnel, equipment and training for the maritime community. The conclusion is that Lantamal III Jakarta, in synergy with the Regional Government of DKI Jakarta, plays an important role in managing flood disasters by

focusing on preparedness, synergy and implementation of Non-War Military Operations Tasks (OMSP). This role includes logistical support, personnel, technology, as well as close coordination with the DKI Jakarta Government to ensure effective and integrated response locally.

Keywords: *Civil Military Synergy, Disaster Management, DKI Jakarta Government, Lantamal III Jakarta*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, yang terletak di antara Lempeng Eurasia, Lempeng Indonesia-Australia, dan Lempeng Pasifik, secara geografis memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi tektonik dan vulkanik. Situasi ini, ditambah dengan bencana lain seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, menjadikan negara ini sangat membutuhkan mekanisme penanggulangan bencana yang efektif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa Indonesia mengalami rata-rata 15 hingga 17 bencana setiap hari, dengan total 4.935 bencana terjadi selama tahun 2023. Dominasi bencana tersebut terutama pada banjir dan tanah longsor, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Jakarta, sebagai ibukota negara, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh bencana banjir. Dari tahun 2021 hingga 2023, frekuensi dan intensitas banjir yang melanda Jakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data dari BNPB menunjukkan bahwa titik banjir di Jakarta meningkat dari 170 titik pada tahun 2021 menjadi 204 titik pada tahun 2023. Masalah ini diperburuk oleh kondisi geografis Jakarta yang kaya akan saluran air, tetapi sering kali tidak mampu menangani volume hujan yang ekstrem, sehingga menyebabkan kerugian yang besar.

Kerugian yang dialami akibat banjir di Jakarta tidak hanya bersifat materil, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Total kerugian dari bencana banjir selama periode tersebut diprediksi mencapai 12 triliun rupiah. Oleh karena itu, penanganan yang sistematis dan terkoordinasi dari berbagai instansi terkait, termasuk peran TNI, menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang di DKI Jakarta. Upaya mitigasi jangka panjang serta peningkatan kesiapsiagaan perlu dilakukan guna menghadapi bencana banjir yang kerap melanda.

Dalam konteks kesiapsiagaan penanggulangan bencana, TNI berperan sebagai salah satu alat tanggap bencana yang efektif. TNI, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dituntut untuk siap melaksanakan berbagai tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu pasukan TNI yang memiliki tugas penting dalam menangani bencana banjir di Jakarta adalah Lantamal III. Tugas pokok Lantamal III mencakup pembinaan kekuatan, dukungan logistik, patroli keamanan laut, serta pembawahi beberapa Pangkalan TNI Angkatan Laut di kawasan tersebut.

Kegiatan penanggulangan bencana mencakup seluruh tahap, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, pencegahan, hingga pemulihan setelah terjadinya bencana. Lantamal III Jakarta telah mempersiapkan ratusan personel dan armada untuk melakukan evakuasi korban banjir. Koordinasi dengan pemerintah daerah

dan satgas bencana sangat esensial dalam langkah-langkah ini. Kesiapan ini sesuai dengan tugas pokok Lantamal III untuk menyelenggarakan dukungan dalam keadaan darurat.

Peraturan dasar dalam penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur model pembangunan yang harmonis dengan situasi lokal. Dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya, dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BNPB juga memainkan peran vital dalam pengawasan dan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional. Sebagai koordinator utama, BNPB melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terlibat, termasuk TNI dan Basarnas. Upaya cepat dan responsif dalam menangani bencana menjadi kunci untuk mengurangi dampak yang dihasilkan. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, TNI berperan secara aktif dalam penanggulangan bencana, melaksanakan kebijakan pertahanan yang mencakup operasi bantuan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menegaskan bahwa tugas pokok TNI meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Meskipun terdapat regulasi yang mendasari, koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah sering kali berada dalam kerangka regulasi yang terpisah, menciptakan ego sektoral dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kekurangan dalam SOP bersama di level operasional dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidakefektifan dalam merespons bencana.

Permasalahan penanggulangan bencana di DKI Jakarta merupakan tantangan yang memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk Lantamal III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antara Lantamal III dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menangani bencana banjir, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di masa mendatang. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif, diharapkan dapat ditangani permasalahan banjir yang begitu kompleks di Jakarta secara lebih efisien.

B. METODE PENELITIAN

Manajemen bencana, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, didefinisikan sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Proses ini terbagi menjadi tiga tahap utama: prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, terdapat kegiatan perencanaan, pengurangan risiko, dan mitigasi, yang mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana. Saat tanggap darurat, respons cepat difokuskan pada penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban. Pascabencana mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana penting untuk membangun kembali infrastruktur secara lebih baik dan lebih aman. Tahap-tahap tersebut menciptakan siklus manajemen bencana yang terintegrasi, bertujuan untuk meningkatkan

ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Teori sinergitas berkaitan erat dengan kolaborasi yang menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jika unsur-unsur tersebut berdiri sendiri. Dalam konteks penanggulangan bencana, sinergi antara berbagai pelaku kebencanaan dianggap penting untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Sinergitas di dalam organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara individu dan kelompok. Aspek penting dari teori ini mencakup komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak terkait, sehingga memperkuat upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Selain itu, dalam kolaborasi yang sinergi, peluang untuk inovasi dan kreatifitas juga mengalami peningkatan, yang dapat menghadirkan ide-ide baru yang tidak mungkin muncul dalam prosedur kerja yang terpisah. Dengan demikian, teori sinergitas menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi yang efektif dapat menciptakan nilai tambah yang substansial, sangat penting untuk situasi penanggulangan bencana.

Pentingnya kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana tidak dapat dipandang sebelah mata. Teori ini menekankan keterlibatan militer sebagai sumber daya yang krusial dalam menghadapi situasi darurat, berbekal kesiapan personel dan peralatan yang lebih baik dibandingkan banyak instansi sipil. Keterlibatan militer diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa TNI bertugas melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP), yang meliputi bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana

alam. Prinsip-prinsip pelaksanaan OMSP melibatkan legitimasi, kesatuan tujuan, koordinasi, keamanan, dan ketekunan, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan adanya struktur komando yang jelas, militer dapat digerakkan secara cepat, memberikan respons yang diperlukan dalam situasi darurat dan bermain peran penting dalam membangun kerjasama efektif dengan pemerintah daerah, BNPB, dan instansi terkait lainnya.

Teori implementasi kebijakan mengemukakan bahwa untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik dengan baik, penting untuk mengenali variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam model yang diusulkan oleh George C. Edward III, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses dinamis, di mana banyak faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil akhir. Empat faktor utama yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efisien dan transparan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan berbagi informasi dan memahami tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Sumber daya yang cukup, baik dalam hal personel maupun materi, sangat penting untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara disposisi berkaitan dengan keinginan dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan baik, struktur birokrasi mencakup pembagian tugas dan kewenangan yang mempengaruhi keefektifan kebijakan. Dengan demikian, model ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Pelibatan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan bencana di Indonesia telah

diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain tugas operasi militer perang, peran TNI juga mencakup operasi militer selain perang (OMSP), yang bertujuan untuk membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan memberikan bantuan kemanusiaan. TNI diharapkan dapat memberikan bantuan cepat dan efektif, yang didorong oleh garis komando yang jelas dan kesiapan personel yang mumpuni. Kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi payung hukum bagi pelaksanaan OMSP, termasuk penunjukan TNI untuk membantu penanggulangan bencana atas permintaan kepala daerah. Dengan demikian, TNI dapat berkontribusi secara signifikan dalam situasi darurat, menjembatani kesenjangan kemampuan yang mungkin ada dalam penanganan bencana oleh instansi sipil. Interaksi dan kerjasama antara TNI dengan lembaga lain seperti BNPB dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menangani dampak bencana secara efektif, memastikan bahwa semua upaya penanggulangan terkoordinasi dengan baik.

Penelitian oleh Nrangwesthi Widyaningrum dkk (2020) berjudul “Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung)” melakukan analisis mendalam mengenai kontribusi TNI dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan TNI selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, yang menetapkan fungsi TNI dalam penanggulangan bencana. Korem 043/Gatam telah melakukan langkah-langkah strategis dari tahap

prabencana hingga pascabencana, termasuk bakti sosial, sosialisasi kepada masyarakat, dan komunikasi sosial saat bencana terjadi. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan bencana secara efektif.

Kristiyono dkk (2021) dalam penelitian berjudul “Peran Nyata Pusat HidroOseanografi TNI Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Bencana” bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pushidrosal dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menggambarkan keterlibatan Pushidrosal yang aktif dalam survei investigasi untuk navigasi dan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Penelitian menunjukkan bahwa Pushidrosal dilibatkan dalam berbagai kegiatan pencarian dan penyelamatan, mengatasi bencana di lokasi-lokasi kritis seperti Palu dan Banten. Keberhasilan Pushidrosal dalam misi penanggulangan bencana, termasuk dalam insiden transportasi di laut, menekankan peran militernya sebagai sumber daya vital dalam respon bencana.

Tri Sandya Palanda (2021) mengangkat topik “Analisis Kerjasama Sipil-Militer dalam Tanggap Darurat Bencana Alam di Palu, Sulawesi Tengah,” yang mengeksplorasi interaksi dan kolaborasi antara organisasi sipil dan militer. Penelitian ini menyoroti pentingnya hubungan yang efektif dalam tanggap darurat agar dapat menghadapi situasi bencana dengan lebih efisien. Meskipun demikian, hasilnya menunjukkan bahwa pembagian tugas antara TNI dan sipil masih belum berjalan dengan baik, yang menghambat proses penanganan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan komunikasi, kerjasama yang lebih kuat, latihan bersama, serta pembentukan

satuan tugas yang mencakup TNI dan lembaga terkait, sehingga menciptakan kerjasama yang sinergis dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan metode *quqlitative research* yang bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan Lantamal III dalam penanggulangan bencana banjir dan implementasi tugas OMSP dalam penanggulangan banjir di DKI Jakarta serta sinergitas sipil militer antara Lantamal III Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana banjir. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena penanggulangan bencana, khususnya mengenai sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait seperti Lantamal III Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta. Pendekatan ini digunakan guna mendeskripsikan, menggali, dan menganalisis data secara sistematis dan faktual diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, sehingga dapat menangkap makna, pengalaman, serta konteks sosial dan kelembagaan yang mendasari strategi, kesiapsiagaan, dan tantangan dalam penanggulangan banjir.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para informan yang kompeten, artinya para informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi mengenai suatu penelitian. (Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 2000). Penelitian ini mengambil subyek utama, yaitu para informan yang memahami penanggulangan bencana alam banjir oleh Lantamal III Jakarta periode tahun 2021 hingga tahun 2023, serta bentuk Kerjasama Lantamal III Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, yang merupakan

data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan angka. Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup gambaran umum objek penelitian, yaitu Lantamal III Jakarta dan BPBD DKI Jakarta, serta penjelasan mengenai kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana banjir. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi peneliti terhadap Lantamal III Jakarta terkait kerjasama sipil-militer, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, dokumen, dan kebijakan-kebijakan terkait yang relevan, yang mencakup aktivitas penanggulangan bencana yang diadakan oleh Lantamal III Jakarta antara tahun 2021 hingga 2023 dan kolaborasinya dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Pengumpulan data merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait dalam mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*in-depth interview*) dan studi literatur (*desk research*), di mana wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana oleh Lantamal III Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta. Hasil wawancara yang dicatat dan ditranskrip menjadi data primer, sementara alat bantu seperti alat tulis, voice recorder, dan kamera digunakan dalam proses wawancara terstruktur. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan kebijakan terkait penanggulangan bencana, dan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mencatat bagaimana optimalisasi kerjasama ini berjalan,

yang seluruhnya dicatat dalam bentuk catatan lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh. Proses ini melibatkan pengorganisasian, pemilahan, dan pengolahan data ke dalam susunan yang sistematis dan bermakna, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, lalu menjabarkannya ke dalam unit-unit yang relevan untuk melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih aspek-aspek penting yang layak untuk dipelajari, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan yang jelas. Mengacu pada Sugiyono, teknik analisis ini mencakup kategori sistematis yang memudahkan pemahaman bagi peneliti dan audiens. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif yang digunakan berfokus pada analisis konten dan analisis naratif, diikuti dengan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai data yang dikumpulkan, meliputi:

1. Analisis Deskriptif - Untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data terkait intensitas latihan, sarana latihan, dan kejadian *trauma akustik*.
2. Tahap komparasi. Merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.

3. Tahap penyajian hasil penelitian. Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada wawancara dengan Informan 1, dibahas mengenai kesiapsiagaan Lantamal III dalam penanggulangan bencana di DKI Jakarta. Informan 1 menjelaskan bahwa kesiapsiagaan Lantamal III sangat bergantung pada pemahaman prajurit terhadap bencana, pelatihan intensif, kesiapan sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan respons cepat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pimpinan yang visioner dan responsif dalam menghadapi situasi darurat dan sinergitas yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya, Informan 2 menyoroti perencanaan kegiatan dan anggaran Lantamal III dalam penanggulangan bencana. Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan prajurit, kesiapan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam implementasi tugas OMSP. Informan 2 juga mengungkapkan bahwa sinergi antara militer dan sipil dalam pencegahan dan penanggulangan bencana berperan penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Informan 3, dibahas pentingnya keterlibatan masyarakat maritim dalam kesiapsiagaan bencana. Informan 3 menyampaikan bahwa meskipun sistem peringatan dini belum optimal, koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat maritim diharapkan dapat

meningkatkan kesiapsiagaan Lantamal III. Ia juga menjelaskan bahwa sinergitas dengan Pemerintah DKI sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evakuasi saat terjadi bencana, serta evaluasi pasca-kejadian.

Informan 4 menekankan pentingnya pembinaan dan pemanfaatan potensi maritim dalam penanggulangan bencana. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan BPBD dan latihan rutin untuk meningkatkan sistem peringatan dini menjadi prioritas. Informan 4 juga mengungkapkan bahwa sinergitas antara sipil dan militer dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan respons cepat dan efektif.

Wawancara dengan Informan 5 menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sarana dan prasarana pendukung operasi. Ia menyatakan bahwa meskipun Lantamal III belum memiliki sistem peringatan dini, koordinasi dengan Pemerintah DKI dan masyarakat maritim dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Informan 5 juga menekankan pentingnya sinergitas antara militer dan sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bencana, guna memastikan respons yang efektif.

Informan 6 mengungkapkan bahwa Yonmarhanlan III memiliki kesiapan operasional yang tinggi dengan personel terlatih dan peralatan lengkap. Informan 6 menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang terhubung dengan BPBD dan koordinasi yang jelas antara militer dan sipil untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Sinergitas dalam penanggulangan bencana, menurut Informan 6, dilakukan dengan komunikasi yang efektif dan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam setiap fase penanggulangan.

Dalam wawancara dengan Informan 7, dibahas pentingnya kebijakan berbasis data akurat dan sistem informasi yang canggih dalam penanggulangan bencana. Informan 7 menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan birokrasi, integrasi sistem antara BPBD dan Lantamal III meningkatkan efektivitas respons. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bencana untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.

Informan 8 menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan infrastruktur yang terkoordinasi dengan baik dalam penanggulangan bencana. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan birokrasi antara sipil dan militer, sinergitas ini sangat penting untuk meningkatkan respons dan rehabilitasi bencana sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

Terakhir, Informan 9 mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan penanggulangan bencana sangat bergantung pada SDM, sistem peringatan dini, dan infrastruktur yang siap. Informan 9 menjelaskan bahwa implementasi penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta 2021-2023 melibatkan koordinasi yang baik antara BPBD dan Lantamal III, serta sinergitas yang diterapkan dalam setiap tahap penanggulangan bencana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

Dari wawancara dengan sembilan informan, terungkap bahwa kesiapsiagaan Lantamal III dalam penanggulangan bencana di DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh pemahaman prajurit, pelatihan, kesiapan sarana, dan penggunaan teknologi. Sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat maritim

serta kebijakan yang responsif merupakan kunci dalam merespons situasi darurat. Meskipun tantangan seperti kurangnya sistem peringatan dini dan birokrasi masih ada, koordinasi yang baik dan keterlibatan masyarakat dianggap vital untuk mengoptimalkan kemampuan penanggulangan bencana, evaluasi, dan rehabilitasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian dan analisis menggunakan Nvivo12, pembahasan dan interpretasi dalam tesis ini dapat dijabarkan dalam beberapa subbagian yang mendalam.

Bencana banjir di DKI Jakarta menjadi ancaman berulang yang dapat menyebabkan kerugian signifikan, baik dalam hal infrastruktur maupun kehidupan masyarakat. Dengan tantangan ini, Lantamal III, sebagai satuan TNI Angkatan Laut yang berada di Jakarta, memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana. Fokus utama mereka adalah memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan fungsi penanggulangan.

Lantamal III berperan strategis dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mengintegrasikan kesiapan personel dan peralatan, serta berkolaborasi dengan instansi terkait. Dalam situasi bencana, mereka tidak hanya bertindak sebagai eksekutor di lapangan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam kerjasama sipil-militer, menjamin bahwa semua upaya dilakukan secara efektif.

Sinergitas antara Lantamal III dan Pemerintah DKI Jakarta tercermin pada implementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI dilibatkan

dalam penanggulangan bencana alam, memberikan dukungan logistik dan sumber daya manusia terlatih, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai koordinator.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana memerlukan kesiapsiagaan, tanggapan cepat, dan pemulihan yang efektif. Sinergitas ini membuat penanggulangan bencana menjadi lebih terstruktur dan sistematis, meningkatkan respons terhadap situasi darurat.

Keterlibatan Lantamal III dalam penanggulangan bencana banjir mencerminkan peran mereka sebagai bagian dari tugas OMSP TNI. Melalui pelatihan dan kolaborasi, mereka menunjukkan bahwa bencana alam dapat ditangani secara lebih efektif.

Studi ini mengedepankan kesiapsiagaan Lantamal III dalam menghadapi bencana banjir 2021-2023. Dengan menerapkan teori manajemen bencana dan sinergitas, Lantamal III semakin memperkuat peran mereka dalam keselamatan masyarakat Jakarta.

Hasil analisa menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tersebut mencakup pelatihan intensif bagi personel yang bertugas. Pelatihan yang berkala dan terstruktur membuat mereka lebih siap secara mental dan fisik dalam menghadapi bencana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan aspek penting dari kesiapsiagaan. Peralatan penyelamatan dan logistik harus selalu dalam keadaan siap pakai agar dapat digunakan saat dibutuhkan.

Selain itu, penerapan teknologi modern dalam monitoring bencana juga menunjukkan peran krusial Lantamal III. Teknologi canggih memungkinkan pengumpulan data secara real-time, mempercepat respons darurat yang tepat.

Respon cepat dan tepat menjadi inti dari tahap tanggap darurat. Pemahaman personel yang baik serta penggunaan teknologi mendukung kinerja mereka dalam situasi ketika setiap detik sangat berharga.

Kebijakan pimpinan yang strategis berfungsi untuk memastikan pemulihan yang efektif setelah bencana terjadi. Aktualisasi dari kebijakan ini dapat mempercepat proses rehabilitasi dan menghindari kesalahan yang tidak perlu.

Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, instansi, dan masyarakat merupakan kunci manajemen bencana yang sukses. Dengan kerjasama lintas sektor, tugas Lantamal III menjadi lebih terintegrasi dan sistematis.

Penanggulangan bencana sangat bergantung pada kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang efektif, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam pemulihan dan mitigasi.

Keterlibatan teknologi dalam monitoring bencana menunjukkan bahwa Lantamal III tidak hanya mengandalkan sumber daya manusia, tetapi juga sarana modern untuk memperkuat respon mereka.

Analisis terhadap peran Lantamal III mencerminkan hasil positif sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian terdahulu, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Widyaningrum dkk dan Kristiyono dkk, menunjukkan pentingnya peran militer dalam kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini menegaskan pelajaran berharga yang dapat diambil untuk perbaikan.

Periode bencana banjir 2021-2023 memberikan tolak ukur bagi Lantamal III. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori manajemen bencana, kesiapsiagaan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Meskipun kesiapsiagaan Lantamal III cukup baik, masih ada beberapa tantangan, seperti perlunya evaluasi berkala terhadap pelatihan dan sarana untuk memastikan efektivitas dalam operasi di masa depan.

Kerjasama antara Lantamal III dan pemerintah daerah harus terus berkembang. Mengingat tantangan dan kompleksitas yang ada, investasi dalam pelatihan dan koordinasi akan memaksimalkan kinerja dalam penanggulangan bencana.

Analisa menunjukkan bahwa sinergitas antara Lantamal III dan Pemerintah DKI Jakarta merupakan contoh ideal kolaborasi sipil-militer. Hal ini mencerminkan bahwa penanggulangan bencana dapat lebih efektif jika didukung oleh banyak pihak.

Secara keseluruhan, implementasi sinergitas dalam penanggulangan bencana oleh Lantamal III Jakarta menunjukkan keberhasilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Evaluasi terus-menerus dan adaptasi terhadap tantangan akan memastikan bahwa kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana semakin baik di masa mendatang..

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Sinergitas antara pihak sipil dan militer merupakan faktor kunci dalam penanggulangan bencana alam, khususnya banjir di DKI Jakarta, sebagaimana terlihat dari

kerjasama strategis antara Lantamal III Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta pada 2021-2023 yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terpadu. Dukungan logistik, teknologi modern, pelatihan intensif, dan koordinasi berkesinambungan menunjukkan upaya membangun sistem penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak. Meskipun peran Lantamal III sangat vital dalam kesiapsiagaan dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), masih terdapat kekurangan dalam pelatihan spesifik, perawatan sarana, integrasi teknologi monitoring, serta ketergantungan militer sebagai respon tercepat. Tantangan dalam sistem komunikasi dan evaluasi juga mengindikasikan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sinergi antara militer dan instansi sipil dalam penanggulangan bencana banjir di masa depan.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antara Lantamal III Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir, diperlukan langkah strategis yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan personel berkelanjutan, pemeliharaan sarana prasarana, serta kolaborasi dengan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Di sisi regulasi, pembuatan SOP dan kebijakan kerjasama serta pembentukan tim dan posko tanggap darurat bersama menjadi prioritas untuk memperkuat koordinasi. Selain itu, penguatan sinergitas dengan melakukan sosialisasi manajemen bencana kepada masyarakat, pengembangan infrastruktur teknologi seperti pusat komando dan sistem

peringatan dini, serta peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara Lantamal III, Pemda DKI Jakarta, dan masyarakat dalam situasi darurat sangat penting. Rekomendasi ini bertujuan mewujudkan penanggulangan bencana banjir yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui sinergi yang kuat antara unsur sipil dan militer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bandur, Agustinus, Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Buzan, Barry, People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Covey, Stephen. R, The 7 Habits Of Highly Effective People. New York: Simon and Schuster, 1989. .
- Creswell John W, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. London: Sage Publications Inc, 2014.
- Creswell, John W, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016 Kabupaten Jepara.
- D. Alexander, Principles of Emergency Planning and Management. United Kingdom: Oxford University Press, 2002.
- Dewan Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia.

- Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010.
- Edward III, George C, Public Policy Implementing. London: Jai Press Inc, 1984).
- Gulo, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Handoko, Kristian, Materi Umpan Balik Yang Cepat Dapat Diterapkan Pada Perusahaan. Bandung: Pustaka Baru, 2006.
- Ibrahim, M, Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung, 2015..
- Kementerian Pertahanan RI, Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2010.
- Lindell, K and R.W. Perry, Behavioral Foundations of Community Emergency Planning. Washington DC: Hemisphere Publishing Corporation, 1992.
- Miles, M. A.M. Huberman, and J. Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. USA: Sage Publication Inc, 2014.
- Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi. Surabaya: Medika Utama, 2005.
- Mulyana, Dedy, Human Communication. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munandar, Kreativitas Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Mutu. Salatiga: Cipta Karya, 2006.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- S, Hadi, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Santoso, Ardi, *Pengaplikasian Komunikasi Yang Efektif di Perusahaan*. Yogyakarta: Kertasono Press, 2011.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Sofyandi, *Macam-Macam Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2003.
- Stoner, J.A.F and R.E Freeman, *Management*. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Insani*. Jakarta: Kencana, 2005.
- UN-CMCoord, *UN-CMCoord Field Handbook*. Geneva: Author, 2015.
- UN-OCHA, OSLO Guidelines: Guidelines on The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief. Geneva: Author, 2007.
- US Military Joint Publication, Principle of Military Operation Other Than War. USA: US Military, 1995.
- Wahyuni, Sari, Qualitative Research Method - Theory and Practice. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Yusuf, A. Murni, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Palanda, Tri Sandia, “Analisis kerjasama sipil-militer dalam tanggap darurat bencana alam di Palu Sulawesi Tengah,” Tesis Dikreg Seskoal:Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan ke-59 (2021).